

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dengan kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah selain

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Panji dan Dwirandra (2014) diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Liliana *et al.* (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Jaeni dan Anggana (2016) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

Menurut penelitian Prakosa (2004), transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah.

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembelanjaan daerah adalah ketergantungan pemerintah

daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (16) belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan dana dari pemerintah pusat.

Dengan adanya peningkatan PAD, masyarakat mengharap adanya peningkatan pelayanan terutama di sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Harapan ini bisa terwujud apabila ada upaya dari pemerintah memberikan fasilitas pendukung investasi. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk hal itu. Apabila investor

mau menanamkan modalnya di kabupaten/kota di Jawa Barat, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat akan meningkat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan Dwirandra (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian sebelumnya menggunakan variabel PAD, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, serta penelitian dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2006-2011, sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2014).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan antara PAD dengan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap hubungan antara PAD dengan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Apabila seseorang peneliti telah selesai melakukan penelitian dan memperoleh hasil, maka diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang diteliti. Oleh karena itu, melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dicapai beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah dunia pustaka bagi pembaca.
 - b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi sektor publik, sehingga dapat mengetahui pentingnya pemanfaatan PAD

terhadap belanja daerah serta dampak dengan adanya Pertumbuhan Ekonomi terhadap hubungan antara PAD dengan Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah.
- b. Dapat dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk kemajuan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika penulisan yang baik, teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, mencantumkan secara urut dari bab ke bab. Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian, yang meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan definisi otonomi daerah, APBD, PAD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel, data dan sumber data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data, temuan empiris yang diperoleh penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.